

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sebuah sistem kontribusi finansial yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, dan entitas lainnya dalam suatu negara. Tujuan utama dari pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang nantinya digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan layanan sosial lainnya (Putri and Taun, 2023). Dengan demikian, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pajak juga berperan dalam mengatur distribusi kekayaan dan meningkatkan keadilan sosial. Sistem pajak biasanya didesain berdasarkan prinsip keadilan dan kemampuan bayar, di mana mereka yang memiliki penghasilan atau kekayaan lebih tinggi diharapkan untuk membayar lebih banyak pajak dibandingkan dengan mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih rendah. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat kebijakan ekonomi untuk mengendalikan inflasi, mengatur tingkat konsumsi, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menggunakan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu optimalisasi penerimaan pajak sebagai prioritas utama bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak yang belum mencapai potensi yang ada. Terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebabnya, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), serta sistem administrasi perpajakan yang belum efektif (Effendi and Sandra, 2022).

Kepatuhan wajib pajak yang rendah dapat disebabkan oleh pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan yang masih kurang memadai, serta persepsi bahwa pembayaran pajak tidak memberikan manfaat langsung bagi mereka. Di sisi lain, praktik penghindaran dan penggelapan pajak juga masih

menjadi tantangan, akibat kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas di bidang perpajakan. Selain itu, sistem administrasi perpajakan yang rumit dan tidak ramah pengguna juga turut berkontribusi terhadap belum optimalnya penerimaan pajak. Proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak yang berbelit-belit dapat menurunkan minat masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perbaikan di seluruh aspek tersebut menjadi kunci untuk meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah perlu menerapkan strategi komprehensif yang mencakup berbagai aspek. Misalnya, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, agar pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan semakin meningkat. Selain itu, pemberian insentif atau kemudahan bagi wajib pajak yang patuh juga dapat mendorong kepatuhan sukarela.

Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan praktik penghindaran pajak serta penggelapan pajak. Langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan, optimalisasi pertukaran informasi antarnegara, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku tindak pidana perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan juga menjadi faktor kunci, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyederhanakan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Seluruh upaya tersebut perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara optimal. Komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, otoritas pajak, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya akan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tujuan ini.

Upaya penegakan hukum perpajakan tak dapat dilepaskan dari keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten. Sanksi berfungsi sebagai alat pencegah (preventif) maupun alat penegak (represif) agar wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Umam and Irfan Arifianto, 2023). Tanpa adanya ancaman sanksi yang jelas, sulit bagi otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan sukarela dari para wajib pajak. Pemberlakuan sanksi perpajakan yang adil dan proporsional diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan sukarela. Semakin besar potensi

sanksi yang akan diterima, semakin besar pula insentif bagi wajib pajak untuk patuh. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan sangat bergantung pada kejelasan, konsistensi, dan proporsionalitas sanksi yang diberlakukan. Hanya dengan pendekatan yang tegas namun adil, dapat diharapkan terbangunnya budaya taat pajak di kalangan masyarakat. Hal ini menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya sistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan.

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) menjadi sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia. Penerimaan dari PPh, baik dari penghasilan perorangan maupun perusahaan, memberikan kontribusi signifikan bagi keuangan negara. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan PPh, salah satunya pengenaan pajak PPh Pasal 23 pada sektor jasa. Sistem *Withholding Tax* di Indonesia diterapkan pada Prosedur pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) terutama PPh Pasal 23 (Arianty, 2021). Istilah pemotongan dimaksudkan untuk menyatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya. Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan adalah jumlah pajak yang dipungut atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran (Ichsan, 2022). Hal ini telah terbukti menambah potensi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai program-program prioritas pemerintah. Dampak positif dari peningkatan penerimaan PPh tidak hanya dirasakan oleh keuangan negara, tetapi juga mendorong kepatuhan wajib pajak. Sistem pajak yang transparan dan akuntabel menjadi kunci untuk mencapai penerimaan PPh yang optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya peran PPh dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi merupakan salah satu Perusahaan yang dikenakan (PPh) Pasal 23 atas Jasa untuk menjalankan kegiatan operasional Perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memilih judul Tugas Akhir “Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa di PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi.”. Penulis memilih judul tersebut untuk memberikan

pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 serta memberikan gambaran tentang Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa di PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah pokok ini adalah bagaimana prosedur pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa di PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulis

1.3.1 Tujuan Penulis

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui prosedur pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atas jasa di PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulis

1. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana Prosedur Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa yang dilakukan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi sesuai peraturan perpajakan.

2. Bagi PT. Taspen (Persero) Cabang Jambi

Sebagai pedoman bahwa Pemotongan PPh Pasal 23 atas Jasa yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2017), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh pengumpul data dari sumber aslinya. Hal ini melibatkan perolehan data penelitian secara langsung dari sumbernya melalui metode seperti wawancara, survei yang dilakukan terhadap individu atau kelompok, atau pengamatan terhadap objek, peristiwa, atau

hasil pengujian. Intinya, peneliti mengumpulkan data dengan menjawab pertanyaan penelitian melalui survei (metode survei) atau menyelidiki objek (metode observasi).

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017), data sekunder merupakan sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data. Hal ini menunjukkan bahwa sumber data penelitian diperoleh melalui perantara maupun tidak langsung, seperti dari dokumen, catatan yang sudah ada, atau arsip, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Dengan kata lain, peneliti mengumpulkan data dengan mengakses sumber seperti perpustakaan pusat studi, pusat arsip, atau dengan membaca secara ekstensif literatur yang relevan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Jenis pengumpulan data yang dilakukan terdiri atas beberapa bagian metode pengumpulan data yang dipakai dalam laporan adalah:

1. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan staf / pegawai PT. Taspen (PERSERO) cabang Jambi tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul.

2. Observasi

Pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat aktivitas yang dijalankan di PT. Taspen (PERSERO) cabang Jambi.

3. Data Kepustakaan

Untuk menyusun laporan magang, langkah awalnya adalah memperoleh informasi yang relevan sehubungan dengan teori-teori yang digunakan. Hal ini dicapai melalui analisis mendalam terhadap buku-buku teks, sumber-sumber daring yang terpercaya, serta berbagai referensi ilmiah lainnya. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konsep-konsep teoritis yang mendasari praktik magang, tetapi juga untuk memvalidasi penggunaan teori tersebut dalam konteks kasus yang dihadapi selama magang. Dengan demikian, laporan magang dapat disusun dengan landasan teoritis yang kuat, menggambarkan aplikasi praktis dari konsep-konsep tersebut dalam situasi nyata.

1.4.3 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode Analisis Deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode penganalisaan data yang menguraikan secara menyeluruh tentang keadaan objek yang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang relevan yang mendukung pembahasan guna mendapatkan suatu kesimpulan.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Program kegiatan magang / praktik kerja ini dilakukan pada 01 Februari 2024 sampai 01 April 2024, di PT. Taspen (PERSERO) Cabang Jambi yang berlokasi di Lrg. Cendana Broni, Solok Sipin, Kec. Telanai Pura, Kota Jambi, Jambi 36124.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada laporan ini terdapat 4 bab yang disusun dan disajikan dengan sistematika antara lain :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menyajikan teori terkait judul dari sumber penelitian terdahulu, studi relevan, dan para ahli.

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum perusahaan mulai dari sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, dan lainnya mengenai perusahaan, lalu berisikan pembahasan terkait pokok masalah atau judul, dan solusi.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini adalah akhir dari penyusunan laporan mengenai kesimpulan serta saran terkait penyusunan laporan.